

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan fungsi dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan pendanaan yang mumpuni dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada setiap daerah dalam menggali potensi daerah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Otonomi daerah telah dimulai sejak 1 Januari tahun 2001 di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diganti dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004.

Sejak saat itu, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralisasi yang dikenal saat ini dengan otonomi daerah. Setelah adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, setiap daerah dapat mengatur keuangan dan mencari sumber pembiayaan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun juga diperlukan pengalokasian dana yang memadai dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah (*Money Follow Program*).

Sesuai dengan perencanaan dari otonomi daerah dan azas desentralisasi fiskal, setiap daerah mengemban tanggung jawab dan konsekuensi yang besar

untuk mengelola keuangan daerah sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menggali dan mengelola potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam menjalankan perekonomian dan tingkat ketergantungan suatu daerah ke pusat. Semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil sumbangan PAD terhadap APBD, semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat (Hibzon, 2016). Terkait dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal itu, Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk merencanakan, menggali dan mengelola serta mengupayakan peningkatan penerimaan semua potensi PAD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 komponen yaitu penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan komponen ini pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dana tersebut yang nantinya akan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 435.612 jiwa dengan komposisi 220.325 jiwa laki-laki dan 215.287 jiwa perempuan berdasarkan hasil proyeksi tahun 2018. Dengan penduduk sebanyak ini, anggaran belanja daerah yang dibutuhkan tidaklah

sedikit. Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat beberapa tahun terakhir selalu meningkat. Penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2014 hingga 2017 selalu mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD sebesar Rp.69,93 milyar dan pada 2018 sebesar Rp.113,53 milyar. Meskipun pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2018 jauh lebih meningkat. Sumbangsih PAD terhadap penerimaan APBD pada tahun 2014 sebesar 7,13% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi 10,10%.

Meskipun jumlah penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio terhadap PAD terbilang masih kecil dibandingkan dengan rasio rata-rata penerimaan daerah secara nasional yaitu sebesar 18,90% (Tjip Ismail, 2011). Hal ini menjelaskan bahwa ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah masih tergolong tinggi. Disamping itu, kinerja pengelolaan PAD di Pasaman Barat diperkirakan masih rendah. Namun demikian belum dapat dikatakan bahwa di daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki potensi penerimaan PAD untuk dikembangkan dan ditingkatkan dimasa mendatang. Maksudnya dengan arah dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah sekarang ini akan memberikan peluang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini ingin mencoba mengungkap dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat

khususnya pada penerimaan PAD untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2018. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “**Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli (PAD) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014- 2018**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Analisis yang dilakukan terhadap kinerja pengelolaan penerimaan PAD di Kabupaten Pasaman Barat dapat membantu terciptanya *good governance* di lingkungan pemerintah khususnya pada pemerintah daerah setempat yang telah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu mengalami peningkatan namun rasio terhadap APBD tergolong rendah, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga daerah tahun 2014 – 2018 ?
2. Bagaimanakah perkembangan dari setiap komponen penerimaan PAD khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014 - 2018 ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk menganalisis perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga daerah tahun 2014 - 2018
2. Untuk menganalisis perkembangan dari setiap komponen penerimaan PAD khususnya pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014 - 2018

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap golongan yang membutuhkan terutama bagi peneliti sendiri, Pemda Kabuten Pasaman Barat, masyarakat dan golongan pelajar. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bermanfaat bagi peneliti lain yang membutuhkan data yang akurat tentang perkembangan komponen penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat.
2. Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan penulis dalam karya ilmiah
3. Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah daerah setempat untuk mengetahui tujuan dan arah kebijakan dalam meningkatkan dan mengevaluasi kinerja untuk mengelola penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat.



4. Penelitian ini bermanfaat untuk mendorong program kegiatan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk masa yang akan datang.
5. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki 11 kecamatan yaitu kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak ranah pasisie dan Kecamatan Kinli. Penelitian ini menganalisis kinerja Pengelolaan PAD Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan data tahunan mulai dari tahun 2014 hingga 2018.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulisannya terdiri dalam enam (6) bagian yang tersusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

## BAB II : METODE PENELITIAN.

Bab III berisi tentang jenis dan sumber data, model penelitian, definisi operasional variabel penelitian, serta teknik pengolahan data yang akan digunakan.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab IV menjelaskan tentang keadaan umum lokasi dimana dilakukannya penelitian, yaitu gambaran umum tentang Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V berisikan tentang semua hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis statistik.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.

